

ANALISIS TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2024

*Analysis of the Transparency Level of Regional Financial
Management Through Official Regency/Municipal Government
Websites in East Nusa Tenggara Province for the 2022-2024 Period*

Agnes Yuliana Nogo Udak^{1,a)}, Herly M. Oematan^{2,b)}, Siprianus G. Tefa^{3,c)}

^{1,2,3)} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} agnesudak5@gmail.com, ^{b)} herly.oematan@staf.undana.ac.id,

^{c)} siprianus.tefa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022–2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi melalui observasi pada 22 website resmi pemerintah daerah. Penilaian transparansi dilakukan pada tiga tahapan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban) melalui pengukuran ketersediaan dokumen dan penilaian kualitas penyajian informasi (aksesibilitas, keterbacaan, ketepatan waktu, relevansi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi secara umum masih rendah dan belum merata. Kabupaten Rote Ndao memperoleh indeks akhir tertinggi sebesar 66,15 (kategori substansial). Kabupaten Sumba Barat, Manggarai, Ngada, dan Kota Kupang berada pada kategori terbatas. Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, dan Sabu Raijua berada pada kategori minimal, sementara sebagian besar daerah lainnya berada pada kategori sedikit. Rendahnya transparansi disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan dokumen dan belum optimalnya kualitas penyajian informasi, terutama pada aspek ketepatan waktu publikasi dan keterangan versi dokumen.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Website Pemerintah Daerah, Open Budget Index, Nusa Tenggara Timur

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya publik. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, yang telah menjadi kebutuhan masyarakat dan memperoleh perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Komitmen tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka (Fajaruddin, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan transparansi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik menyediakan informasi terkait penggunaan anggaran. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ mengamanatkan pemerintah daerah menyediakan menu khusus “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” pada website resmi (Duli et al., 2025). Website menjadi sarana strategis karena mampu menyediakan informasi keuangan daerah secara terbuka, berkelanjutan, dan dapat diakses tanpa batasan geografis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website di Indonesia masih belum optimal dan berbeda antar wilayah. Nurhadianto dan Khamisah (2019) menemukan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung berada pada kategori tidak cukup transparan. Ritonga (2016) menunjukkan rendahnya indeks transparansi pemerintah daerah di wilayah Sumatra. Welly dan Arifin (2021) menunjukkan adanya variasi tingkat transparansi di wilayah Jawa–Bali dengan rata-rata masih rendah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis tingkat transparansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat terbatas, padahal perbedaan kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, serta infrastruktur teknologi informasi berpotensi memengaruhi tingkat keterbukaan informasi keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui website resmi pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022–2024.

KAJIAN TEORI

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang menekankan bahwa organisasi secara aktif berupaya menyesuaikan kegiatan dan kebijakannya agar selaras dengan nilai sosial guna memperoleh dan mempertahankan dukungan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, legitimasi sosial menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Surbakti, 2010). Pemerintah daerah dituntut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik. Salah satu bentuk upaya mempertahankan legitimasi tersebut adalah melalui pengungkapan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel (Azizah et al., 2024). Pemanfaatan website resmi pemerintah daerah sebagai media publikasi informasi keuangan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, serta kesediaan untuk diawasi oleh publik.

Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik mengelola sumber daya ekonomi yang berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan publik. Dana yang dikelola tersebut berasal dari pajak, retribusi, dan sumber penerimaan lainnya yang bersifat publik. Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab karena sumber daya tersebut berasal dari dana publik. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi tuntutan utama

agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah (Indrayani, 2023).

Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik, dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Penerapan transparansi menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pengawasan masyarakat. Prinsip transparansi ini mengacu pada konsep good governance dari United Nations Development Programme (UNDP) yang menekankan keterbukaan informasi, kemudahan akses, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan secara terbuka dan jujur.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah (Surbaktia, 2010). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tahapan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas: (a) perencanaan dan penganggaran (penyusunan APBD hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD), (b) pelaksanaan, serta (c) pelaporan dan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 22 website. Sampel diambil menggunakan teknik sampling total (seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya kurang dari 100). Teknik pengumpulan data adalah observasi pada website resmi dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pengukuran ketersediaan dokumen (skor 1 jika tersedia, 0 jika tidak). Tahap kedua adalah penilaian kualitas penyajian informasi untuk dokumen yang tersedia, meliputi aspek aksesibilitas dan keterbacaan (WA) serta ketepatan waktu dan relevansi (WK). Skor Indikator (SI) dihitung dengan rumus:

$$SI = (WK \times 0,50) + (WA \times 0,50)$$

Skor Total Transparansi (ST) dihitung dengan menjumlahkan seluruh SI. Indeks transparansi per tahap dihitung dengan membandingkan ST terhadap skor maksimum ideal (SMt) dikalikan 100. Indeks akhir transparansi (IA) merupakan rata-rata dari indeks ketiga tahapan. Hasil indeks kemudian dikategorikan berdasarkan Open Budget Index (OBI): Ekstensif (81-100), Substansial (61-80), Terbatas (41-60), Minimal (21-40), Sedikit (0-20).

Penelitian ini menggunakan indikator transparansi yang dikembangkan oleh Huwae (2016) karena indikator tersebut secara komprehensif mencakup seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan total 28 dokumen keuangan yang wajib dipublikasikan. Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan regulasi di Indonesia, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, untuk mengukur transparansi secara lebih substantif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan ketersediaan dokumen (skor dikotomi 0/1) seperti sebagian besar studi sebelumnya, tetapi juga menambahkan penilaian kualitas penyajian informasi yang meliputi empat aspek utama: aksesibilitas (kemudahan menemukan dokumen), keterbacaan (kejelasan format dan isi), ketepatan waktu publikasi, dan relevansi (kesesuaian tahun anggaran). Keempat aspek ini diadaptasi dari prinsip keterbukaan informasi publik dan standar Open Budget Index (OBI). Dengan demikian, indikator yang digunakan memiliki validitas konstruk yang kuat karena mengukur transparansi tidak hanya dari sisi kuantitas dokumen tetapi juga dari sisi kualitas informasi yang benar-benar dapat digunakan masyarakat untuk mengawasi anggaran.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian hanya mengamati tiga tahun anggaran (2022–2024), sehingga belum mampu menangkap tren jangka panjang atau dampak pergantian kepala daerah terhadap transparansi. Kedua, penilaian kualitas penyajian informasi masih bersifat dikotomi (0/1) pada setiap sub-indikator, sehingga belum mengukur tingkat kedalaman informasi (misalnya, apakah dokumen APBD disajikan dalam bentuk ringkasan yang mudah dipahami publik atau hanya file mentah berukuran besar). Ketiga, penelitian tidak menguji faktor-faktor determinan transparansi seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia pengelola website, atau dukungan teknologi informasi. Keempat, observasi dilakukan pada periode waktu tertentu (Februari 2026) sehingga kemungkinan ada dokumen yang dipublikasikan setelah periode observasi tidak terdeteksi. Kelima, penelitian ini terbatas pada satu provinsi (NTT), sehingga generalisasi ke provinsi lain perlu dilakukan dengan hati-hati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Transparansi Tahap Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks transparansi pada tahap perencanaan secara umum masih rendah dan belum merata. Tabel 1 menyajikan indeks transparansi tahap perencanaan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT selama tahun anggaran 2022–2024.

Tabel 1.
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Perencanaan Tahun Anggaran
2022–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Transparansi (Aspek Perencanaan) 2022	Indeks Transparansi (Aspek Perencanaan) 2023	Indeks Transparansi (Aspek Perencanaan) 2024	Indeks Rata- rata
Kabupaten Alor	8.3	8.3	8.3	8.33
Kabupaten Belu	46.7	13.3	13.3	24.44
Kabupaten Ende	13.3	6.7	13.3	11.11
Kabupaten Flores Timur	0	0	0	0
Kota Kupang	33.3	41.7	63.3	46.11
Kabupaten Lembata	16.7	8.3	20.0	15.00
Kabupaten Malaka	0	0	0	0
Kabupaten Manggarai	60.0	33.3	40.0	44.44
Kabupaten Manggarai Barat	10.0	23.3	20.0	17.78
Kabupaten Manggarai Timur	35.0	41.7	16.7	31.11
Kabupaten Nagekeo	58.3	36.7	21.7	38.89
Kabupaten Ngada	0	83.3	50.0	44.44
Kabupaten Rote Ndao	83.3	83.3	75.0	80.56
Kabupaten Sabu Raijua	13.3	20.0	30.0	21.11
Kabupaten Sikka	0	0	41.7	13.89
Kabupaten Sumba Barat	8.3	83.3	41.7	44.44
Kabupaten Sumba Barat Daya	13.3	13.3	6.7	11.11
Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0	0
Kabupaten Sumba Timur	0	0	0	0
Kabupaten Timor Tengah Selatan	20.0	20.0	38.3	26.11
Kabupaten Timor Tengah Utara	0	0	41.7	13.89
Kabupaten Kupang	0	0	0	0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Kabupaten Rote Ndao memperoleh rata-rata indeks tertinggi (80,56) karena konsistensi publikasi dan kualitas penyajian yang baik. Kota Kupang, Manggarai, Ngada, dan Sumba Barat menyusul dengan indeks rata-rata 46,11; 44,44; 44,44; dan 44,44 (kategori terbatas). Kabupaten Nagekeo (38,89), Manggarai Timur (31,11), Timor Tengah Selatan (26,11), Belu (24,44), dan Sabu Raijua (21,11) berada pada kategori minimal hingga sedikit. Sebaliknya, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Kabupaten Kupang memperoleh indeks 0 karena tidak ditemukannya dokumen perencanaan pada website resmi selama periode 2022–2024.

Indeks Transparansi Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Tabel 2 menyajikan indeks transparansi yang secara umum masih rendah.

Tabel 2.
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaksanaan Tahun Anggaran 2022–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Transparansi (Aspek Pelaksanaan) 2022	Indeks Transparansi (Aspek Pelaksanaan) 2023	Indeks Transparansi (Aspek Pelaksanaan) 2024	Indeks Rata-rata
Kabupaten Alor	0,00	9,26	0,00	3,09
Kabupaten Belu	0,00	14,81	14,81	9,88
Kabupaten Ende	14,81	7,41	14,81	12,35
Kabupaten Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Kupang	14,81	16,67	46,30	25,93
Kabupaten Lembata	22,22	22,22	22,22	22,22
Kabupaten Malaka	14,81	14,81	14,81	14,81
Kabupaten Manggarai	29,63	44,44	29,63	34,57
Kabupaten Manggarai Barat	0,00	0,00	29,63	9,88
Kabupaten Manggarai Timur	0,00	18,52	18,52	12,35
Kabupaten Nagekeo	0,00	25,93	7,41	11,11
Kabupaten Ngada	0,00	83,33	31,48	38,27
Kabupaten Rote Ndao	83,33	83,33	18,52	61,73
Kabupaten Sabu Raijua	22,22	7,41	33,33	20,99
Kabupaten Sikka	0,00	0,00	27,78	9,26
Kabupaten Sumba Barat	0,00	83,33	37,04	40,12
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	0,00	7,41	2,47
Kabupaten Sumba Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	0,00	37,04	12,35
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	0,00	37,04	12,35
Kabupaten Kupang	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Kabupaten Rote Ndao kembali mencatat indeks tertinggi (61,73), diikuti Sumba Barat (40,12), Ngada (38,27), Manggarai (34,57), dan Kota Kupang (25,93). Sebagian besar daerah lainnya berada pada indeks di bawah 25, dengan Kabupaten Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Kabupaten Kupang berindeks 0. Rendahnya indeks disebabkan oleh terbatasnya publikasi dokumen realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta dokumen perubahan APBD. Bahkan pada daerah yang menyediakan dokumen, kualitas penyajian informasi masih lemah, terutama pada aspek ketepatan waktu dan keterangan versi dokumen.

Indeks Transparansi Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan tahap lainnya, seperti disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.
Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Transparansi (Aspek Pelaporan dan Pertanggung jawaban) 2022	Indeks Transpa ransi (Aspek Pelapora n dan Pertangg ungjawa ban) 2023	Indeks Transparansi (Aspek Pelaporan dan Pertanggung jawaban) 2024	Indeks Rata-rata
Kabupaten Alor	0,00	26,67	26,67	17,78
Kabupaten Belu	51,85	7,41	7,41	22,22
Kabupaten Ende	7,41	0,00	0,00	2,47
Kabupaten Flores Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kota Kupang	51,85	46,30	59,26	52,47
Kabupaten Lembata	31,48	9,26	0,00	13,58
Kabupaten Malaka	7,41	29,63	29,63	22,22
Kabupaten Manggarai	59,26	59,26	51,85	56,79
Kabupaten Manggarai Barat	3,70	0,00	74,07	25,93
Kabupaten Manggarai Timur	18,52	37,04	46,30	33,95
Kabupaten Nagekeo	55,56	37,04	0,00	30,86
Kabupaten Ngada	0,00	90,74	62,96	51,23
Kabupaten Rote Ndao	83,33	85,19	0,00	56,17
Kabupaten Sabu Raijua	51,85	14,81	33,33	33,33
Kabupaten Sikka	9,26	0,00	64,81	24,69
Kabupaten Sumba Barat	55,56	87,04	64,81	69,14
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	0,00	14,81	4,94
Kabupaten Sumba Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Sumba Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	0,00	61,11	20,37
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	0,00	64,81	21,60
Kabupaten Kupang	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Kabupaten Sumba Barat memperoleh indeks tertinggi (69,14), disusul Manggarai (56,79), Rote Ndao (56,17), Kota Kupang (52,47), dan Ngada (51,23). Kabupaten Manggarai Timur (33,95), Sabu Raijua (33,33), Nagekeo (30,86), Manggarai Barat (25,93), dan Sikka (24,69) berada pada kategori minimal. Namun demikian, masih terdapat daerah dengan indeks sangat rendah (Ende 2,47; Sumba Barat Daya 4,94) dan empat daerah berindeks 0 (Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Kupang). Kelemahan utama pada tahap ini adalah ketidakhadiran dokumen Laporan Keuangan BUMD, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan Perda Pertanggungjawaban APBD, serta tidak dicantumkannya opini BPK.

Tingkat dan Kategori Transparansi (Indeks Akhir)

Tabel 4 menyajikan indeks akhir transparansi (rata-rata dari ketiga tahapan) dan kategori berdasarkan Open Budget Index (OBI) untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Tabel 4.
Tingkat dan Kategori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website

Kabupaten/Kota	Indeks Akhir	Tingkat / Kategori
Kabupaten Alor	9,73	Sedikit (0-20)
Kabupaten Belu	18,85	Sedikit
Kabupaten Ende	8,64	Sedikit
Kabupaten Flores Timur	0,00	Sedikit
Kota Kupang	41,50	Terbatas (41-60)
Kabupaten Lembata	16,93	Sedikit
Kabupaten Malaka	12,35	Sedikit
Kabupaten Manggarai	45,27	Terbatas
Kabupaten Manggarai Barat	17,86	Sedikit
Kabupaten Manggarai Timur	25,80	Minimal (21-40)
Kabupaten Nagekeo	26,95	Minimal
Kabupaten Ngada	44,65	Terbatas
Kabupaten Rote Ndao	66,15	Substansial (61-80)
Kabupaten Sabu Raijua	25,14	Minimal
Kabupaten Sikka	15,95	Sedikit
Kabupaten Sumba Barat	51,23	Terbatas
Kabupaten Sumba Barat Daya	6,17	Sedikit
Kabupaten Sumba Tengah	0,00	Sedikit
Kabupaten Sumba Timur	0,00	Sedikit
Kabupaten Timor Tengah Selatan	19,61	Sedikit
Kabupaten Timor Tengah Utara	15,95	Sedikit
Kabupaten Kupang	0,00	Sedikit

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Dari Tabel diatas, hanya Kabupaten Rote Ndao yang mencapai kategori substansial (66,15). Empat daerah berada pada kategori terbatas: Sumba Barat (51,23), Manggarai (45,27), Ngada (44,65), dan Kota Kupang (41,50). Tiga daerah berada pada kategori minimal: Nagekeo (26,95), Manggarai Timur (25,80), dan Sabu Raijua (25,14). Sebagian besar daerah lainnya (14 daerah) berada pada kategori sedikit, termasuk 5 daerah yang memperoleh indeks 0 (Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Kupang, dan Malaka dengan indeks 12,35 tetap kategori sedikit).

Pola Sebaran Transparansi

Pemetaan tingkat transparansi (berdasarkan Tabel 4) menunjukkan ketimpangan yang besar antar daerah di Provinsi NTT. Kabupaten Rote Ndao (substansial) menjadi satu-satunya daerah dengan tingkat keterbukaan tertinggi. Daerah dengan kategori terbatas (oranye) terkonsentrasi di wilayah barat dan tengah pulau (Kota Kupang, Manggarai, Ngada, Sumba Barat). Kategori minimal (hijau muda) meliputi Manggarai Timur, Nagekeo, dan Sabu Raijua. Selebihnya, warna merah mendominasi peta, menandakan kategori sedikit yang tersebar di

hampir seluruh wilayah, termasuk kepulauan Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, dan sebagian besar Sumba. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website belum menjadi praktik yang merata dan masih sangat terbatas pada daerah-daerah tertentu.

Pembahasan

Rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) disebabkan oleh dua faktor utama yang saling terkait, yaitu terbatasnya ketersediaan dokumen dan belum optimalnya kualitas penyajian informasi. Pertama, terbatasnya ketersediaan dokumen. Dari 22 pemerintah daerah yang diteliti, hanya Kabupaten Rote Ndao yang secara konsisten menyediakan dokumen pada ketiga tahapan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) selama periode 2022–2024. Sebanyak 5 daerah (Flores Timur, Malaka, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Kabupaten Kupang) bahkan tidak menyediakan satu pun dokumen perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap pelaporan, keempat daerah yang sama juga berindeks 0, kecuali Malaka yang memiliki beberapa dokumen namun sangat terbatas. Ketidakhadiran dokumen ini menunjukkan bahwa website pemerintah daerah belum difungsikan sebagai kanal utama keterbukaan informasi publik. Padahal, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ mewajibkan publikasi dokumen anggaran secara lengkap dan tepat waktu.

Kedua, belum optimalnya kualitas penyajian informasi. Meskipun aspek aksesibilitas dan keterbacaan relatif cukup baik di sebagian daerah (dokumen dapat diunduh dalam format PDF, tautan berfungsi, pencarian dokumen relatif mudah), kelemahan utama terletak pada aspek ketepatan waktu publikasi dan keterangan versi dokumen. Berdasarkan hasil observasi, lebih dari 70% dokumen yang tersedia tidak mencantumkan tanggal publikasi, tanggal pembaruan, atau nomor versi. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan apakah dokumen tersebut adalah APBD murni, perubahan, atau dokumen tahun sebelumnya yang belum diarsipkan dengan benar. Selain itu, masih banyak dokumen yang dipublikasikan tidak sesuai dengan tahun anggaran yang diamati. Misalnya, pada website Kabupaten Sikka, dokumen Perda APBD tahun 2024 baru tersedia pada pertengahan tahun 2025, sehingga tidak relevan dengan periode penelitian. Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Ende dan Kabupaten Lembata.

Menariknya, tingkat transparansi berbeda antar tahapan. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki indeks rata-rata tertinggi (24,6), disusul tahap pelaksanaan (16,4), dan terendah tahap perencanaan (15,9). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih terbuka pada akhir siklus anggaran ketika laporan keuangan telah diaudit BPK, namun kurang transparan pada proses perencanaan yang justru menentukan alokasi sumber daya publik. Keterbukaan pada tahap perencanaan sangat krusial karena memungkinkan masyarakat memberikan masukan sebelum APBD ditetapkan (*right to be heard*). Rendahnya transparansi pada tahap ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan anggaran masih sangat terbatas.

Kabupaten Rote Ndao menjadi satu-satunya daerah dengan kategori substansial (66,15). Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola website secara profesional. Website resmi Rote Ndao (<https://rotendaoKabupatengo.id>) menyediakan

menu khusus “Transparansi Anggaran” yang memuat dokumen lengkap dari tahun 2022 hingga 2024, dengan setiap dokumen mencantumkan tanggal unggahan dan versi. Selain itu, dokumen yang diunggah selalu sesuai dengan tahun anggaran dan tersedia tepat waktu (misalnya, Perda APBD 2024 telah diunggah pada bulan Desember 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kapasitas teknis pengelola website menjadi faktor penentu. Sebaliknya, daerah dengan indeks 0 seperti Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Kupang tidak hanya tidak menyediakan dokumen, tetapi website resmi mereka bahkan tidak dapat diakses selama periode pengamatan (link mati atau dialihkan ke halaman tidak relevan). Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Timur memiliki website yang aktif namun tidak pernah mengunggah dokumen keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan rendahnya prioritas pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi, serta kemungkinan keterbatasan anggaran untuk pengelolaan website dan sumber daya manusia di bidang kehumasan atau PPID.

Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Teori ini menyatakan bahwa organisasi, termasuk pemerintah daerah, harus beroperasi dalam batas-batas nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Dalam konteks pemerintahan, legitimasi masyarakat diperoleh melalui kinerja yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah yang tidak menyediakan informasi keuangan secara terbuka (seperti 14 daerah yang masuk kategori sedikit) akan kehilangan kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat memicu resistensi sosial, tuduhan korupsi, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan daerah. Sebaliknya, Kabupaten Rote Ndao yang secara konsisten mempublikasikan dokumen dengan kualitas baik menunjukkan upaya sadar untuk mempertahankan legitimasi melalui strategi keterbukaan informasi. Hal ini juga sejalan dengan argumen Azizah et al. (2024) bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penentu kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, website tidak hanya berfungsi sebagai gudang dokumen, tetapi sebagai instrumen legitimasi strategis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai studi empiris di wilayah Indonesia lainnya. Nurhadianto dan Khamisah (2019) di Provinsi Lampung menemukan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata indeks di bawah 30. Ritonga (2016) melaporkan rata-rata indeks transparansi di Sumatra hanya 13,79% pada 2015 dan menurun menjadi 9,39% pada 2016, bahkan lebih rendah dari rata-rata NTT. Khoiriyah (2021) di Provinsi Jambi juga menyimpulkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah berada pada kategori sedikit dan minimal, sama dengan temuan kami. Megawati (2022) di Provinsi Riau dan Jambi menambahkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penelitian Welly dan Arifin (2021) di wilayah Jawa-Bali, yang secara ekonomi lebih maju, melaporkan rata-rata indeks 28,37% masih tergolong rendah tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan NTT. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh disparitas infrastruktur teknologi informasi, kapasitas fiskal, dan sumber daya manusia. Meskipun demikian, keberadaan Kabupaten Rote Ndao dengan indeks 66,15 menunjukkan bahwa keterbatasan wilayah bukanlah hambatan mutlak; komitmen politik dan tata kelola yang baik dapat mengatasi keterbatasan tersebut.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini merupakan studi pertama yang secara khusus menganalisis tingkat transparansi pengelolaan

keuangan daerah berbasis website di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selama ini belum banyak dikaji padahal wilayah Indonesia Timur memiliki karakteristik geografis, kapasitas kelembagaan, dan infrastruktur teknologi yang berbeda dengan wilayah Barat dan Tengah. Kedua, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengukur ketersediaan dokumen (Nurhadianto & Khamisah, 2019; Ritonga, 2020; Khoiriyah, 2021), penelitian ini mengintegrasikan penilaian kualitas penyajian informasi (aksesibilitas, keterbacaan, ketepatan waktu, relevansi) sehingga memberikan gambaran transparansi yang lebih komprehensif dan substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun suatu daerah menyediakan dokumen, kualitas penyajian yang buruk (misalnya tidak mencantumkan tanggal publikasi atau versi dokumen) dapat menurunkan indeks transparansi secara signifikan. Ketiga, penelitian ini menyajikan pemetaan (pola sebaran) transparansi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, yang belum dilakukan oleh studi-studi sebelumnya. Pemetaan ini secara visual menunjukkan ketimpangan transparansi yang besar di NTT, dengan hanya satu daerah (Rote Ndao) yang mencapai kategori substansial, sementara 14 daerah lainnya berada pada kategori sedikit.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975) dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang lebih transparan (Rote Ndao) cenderung memiliki legitimasi publik yang lebih baik, sementara daerah dengan indeks 0 justru berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengusulkan bahwa pengukuran transparansi sebaiknya tidak hanya berhenti pada ketersediaan dokumen tetapi juga mencakup aspek kualitas informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi baseline evaluation bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah untuk memetakan kabupaten/kota yang paling tertinggal dalam transparansi, serta menyusun intervensi teknis seperti pelatihan pengelola website, penyediaan template dokumen standar, dan pengawasan berkala terhadap publikasi APBD.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku koordinator wilayah perlu mengeluarkan peraturan gubernur yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk menyediakan menu khusus "Transparansi Anggaran" pada website resmi dengan standar minimum dokumen dan kualitas penyajian (misalnya setiap dokumen wajib mencantumkan tanggal unggahan, nomor versi, dan sesuai tahun anggaran). Kedua, perlu dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Inspektorat Daerah, serta perwakilan masyarakat sipil untuk melakukan penilaian transparansi secara berkala (misalnya setiap semester) dan mempublikasikan peringkat transparansi kabupaten/kota. Ketiga, daerah dengan indeks 0 (Flores Timur, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kabupaten Kupang) perlu mendapatkan pendampingan teknis khusus, termasuk pelatihan pengelolaan website dan penyusunan dokumen keuangan daerah yang dapat diunggah. Keempat, pemerintah pusat (Kemendagri dan Kemenkeu) dapat menjadikan indeks transparansi ini sebagai salah satu indikator kinerja dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau penghargaan keterbukaan informasi publik. Kelima, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat perlu didorong untuk secara aktif menggunakan hak informasi publik dengan mengajukan

permohonan informasi melalui PPID jika dokumen keuangan tidak tersedia, sehingga menciptakan tekanan sosial (social pressure) bagi pemerintah daerah untuk lebih terbuka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022-2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks transparansi tahap perencanaan tertinggi dicapai Kabupaten Rote Ndao (80,56), namun sebagian besar daerah masih rendah dan 5 daerah memperoleh indeks 0.
2. Indeks transparansi tahap pelaksanaan tertinggi juga dicapai Kabupaten Rote Ndao (61,73), dengan 4 daerah berindeks 0.
3. Indeks transparansi tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tertinggi dicapai Kabupaten Sumba Barat (69,14), diikuti Rote Ndao (56,17) dan Manggarai (56,79).
4. Tingkat transparansi secara umum masih rendah: hanya 1 daerah kategori substansial (Rote Ndao), 4 daerah terbatas, 3 daerah minimal, dan 14 daerah kategori sedikit.
5. Pola sebaran transparansi menunjukkan ketimpangan yang besar antar daerah di Provinsi NTT, dengan transparansi yang relatif baik hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah tertentu.

Saran

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator penilaian transparansi yang lebih luas, termasuk aspek interaktivitas website dan partisipasi publik, serta memperluas cakupan wilayah penelitian.

Bagi Objek Penelitian (Pemerintah Daerah): Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT disarankan untuk meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan mempublikasikan dokumen keuangan daerah secara lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. Perlu juga mencantumkan tanggal publikasi dan versi dokumen, serta mengoptimalkan menu transparansi anggaran pada website resmi.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi, serta menggunakan metode mixed methods atau analisis komparatif antar provinsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, S., Al Rosyadah, H. K., & Pratama, V. Y. (2024). Kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai faktor penentu kepercayaan masyarakat. *Sinomika Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i1.2246>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Duli, G. A. A., Toda, H., Nahak Seran, D. A., & Long, B. L. (2025). Efektivitas penerapan e-government dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik: Studi kasus website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata. *Jurnal*

- Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 601–617
<https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1230>
- Fajaruddin, F. (2021). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal SiNTESa*, 1(1), 659 <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395>
- Huwae, K., & Ritonga, I. T. (2016). *Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Indrayani, I. (2023, October 24). *Teaching resource on governmental accounting*. Universitas Islam Negeri (IAIN) Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5323>
- Khoiriyah, A. (2021). *Keterbukaan informasi keuangan daerah berbasis website pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi Tahun 2016–2018*. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21601>
- Megawati, A. (2022). *Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi*. Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42162>
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. *Technobiz International Journal Of Business*, 3(2), 70. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110-126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama. https://drive.google.com/file/d/1ov3giH67WOUWBJLcr74B6vdSDWtS6gv/view?usp=drive_link
- Welly, W., Arifin, M. S., & Ghozali, R. (2021). Analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 157–167. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4219>